

**MODAL SOSIAL PASITABE SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM PROSES  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WASUPONDA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**PASITABE SOCIAL CAPITAL AS TRADITIONAL INSTITUTIONS IN THE  
PROCESS OF WELFARE IN THE DISTRICT EAST OF LUWU  
WASUPONDA**

**SKRIPSI**

**FANY ASRIAL**

**E411 08 295**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2012**

**MODAL SOSIAL PASITABE SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM PROSES  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WASUPONDA  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**SKRIPSI**

**FANY ASRIAL**

**E411 08 295**



**Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memeroleh**

**Derajat Kesarjanaan Pada Jurusan Sosiologi**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2012**

## ABSTRAK

**Fany Asrial, E411 08 295. Modal Sosial PASITABE Sebagai Lembaga Adat Dalam Proses Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Dibimbing oleh Syaiful Cangara dan Suparman Abdullah.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Modal Sosial PASITABE Sebagai Lembaga Adat Dalam Proses Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan Faktor-faktor yang mendukung proses sosial dalam masyarakat PASITABE.

Informan dalam penelitian ini adalah 7 orang yang terdiri dari penduduk asli, badan pengurus PASITABE dan tokoh masyarakat yang telah lama mendiami daerah tersebut. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu informan yang dipilih atau ditentukan secara sengaja oleh peneliti dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian yang mencakup keseluruhan. Sedangkan dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yakni suatu strategi dalam penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang membutuhkan suatu penjelasan yang sejelas-jelasnya dalam mencari suatu fenomena secara mendalam.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa modal sosial PASITABE sebagai lembaga adat dalam proses kesejahteraan masyarakat memperlihatkan bahwa hubungan dalam masyarakat terjalin dengan baik tanpa adanya perbedaan-perbedaan, rasa kepercayaan, keadilan, tanggung jawab, gotong-royong dan lainnya menjadi sebuah tatanan kehidupan sosial yang dibangun bersama dalam lembaga ini bagi kesejahteraan masyarakat PASITABE dengan berbagai macam bentuk kegiatan/program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

## ABSTRACT

**Fany Asrial, E411 08 295. Social Capital PASITABE For Traditional Institutions In The District Social Welfare in East Luwu Wasuponda. Guided by Syaifullah Cangara and Suparman Abdullah.**

The purpose of this study was to determine the picture of social capital PASITABE for traditional institutions in the district social welfare in east Luwu Wasuponda and factors that support social processes in society PASITABE.

Informants in this study is composed of 7 people indigenous PASITABE governing board and community leaders who have long inhabited the area. Techniques used in determining the informants in this study was *purposive sampling* is that informants deliberately chosen or determined by the researchers using a particular consideration. The type is the type of research used a qualitative descriptive study that investigated the problem-solving by illustrating or describing the object of research that covers a whole. While basic research is a case study which used a strategy in qualitative research to answer questions requiring an explanation is very clear in search of a phenomenon in depth.

The results of this research is that social capital PASITABE as traditional institutions in the process of public welfare in the community to show that relations are good in the absence of differences, a sense of trust, fairness, responsibility, mutual help and the other into an order of social life is built together in this institution for the welfare of the people PASITABE with various forms of activities / programs of empowerment that can improve people's lives.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang mempunyai kebudayaan yang begitu luas dan beraneka ragam. Ini ditandai dengan berbagai macam suku, bahasa, dan adat istiadat dari setiap daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Dengan keadaan yang seperti itu pula bangsa kita dikenal dengan keberagaman kebudayaannya. Nilai-nilai budaya yang luhur yang telah diwariskan sebagai suatu sistem sosial yang memperkuat khasanah budaya bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tersebut sebagai lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan.

Terbentuknya lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku. Dalam suatu masyarakat lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional (Soerjono Soekanto, 2010:184).

Lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan mempunyai norma-norma yang berhubungan dalam terlaksananya proses sosial dalam masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya ikatnya. Dan pada akhirnya, umumnya anggota-anggota masyarakat tidak berani melanggarnya.

Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan menjadi adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan (Soerjono Soekanto, 2010:176). Untuk itu dalam lembaga sosial nilai dan norma merupakan suatu tolak ukur dalam menjalin hubungan kerjasama dalam masyarakat. Norma yang terbentuk dari berulangnya pola pergaulan keseharian akan menciptakan aturan-aturan tersendiri dalam suatu masyarakat. Hubungan yang kuat untuk memudahkan kerjasama inilah yang dimaksud dengan modal sosial.

Inti telaah modal sosial terletak pada kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat (J. Hasbullah 2003:9).

PASITABE adalah sebuah konsorsium budaya yang dibentuk oleh sejumlah etnis lokal yang berdiam di ujung utara Sulawesi Selatan. Wilayah tersebut saat ini berada dalam kawasan Kabupaten Luwu Timur. PASITABE dibentuk oleh tiga etnis serumpun yaitu Padoe, Karunsie, dan Tambee. Pergolakan yang terjadi di wilayah Sulawesi pada saat itu, cukup porak-poranda, baik itu dalam hal tatanan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur dan hal lainnya.

Kini, setelah pergolakan yang telah terjadi, membuat mereka menata kembali apa yang telah hilang dan hancur, memang tidak mudah untuk membangkitkan semangat yang telah hilang, perlu waktu bertahun-tahun untuk dapat bangkit dari kehancuran.

Walaupun demikian dan apapun keadaanya, kini mereka telah bangkit dan siap untuk membentuk tatanan kehidupan yang baru, dengan semangat TEPOASO KATO MEMOROSO (dengan bersatu kita menjadi kuat). Berawal dari keadaan tersebut, PASITABE sebagai lembaga adat memberikan suatu kontribusi yang kuat untuk kembali membentuk modal sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini PASITABE memberikan pengaruh bagi keberlangsungan kehidupan untuk menata kembali proses sosial. Adanya rasa kepercayaan, keadilan, tanggung jawab, kebersamaan, gotong royong dan lain-lain yang nantinya menjadi suatu tolak ukur dalam kehidupan masyarakat untuk memudahkan masyarakat melakukan kerjasama dan pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan lainnya.

Masyarakat selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (voluntary), kesamaan (equality), kebebasan (freedom) dan keadaban (civility).

Didalam kehidupan masyarakat, pemenuhan kebutuhan hidup tidak dapat dilepaskan dari norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Manusia sebagai makhluk yang harus hidup bermasyarakat demi kelangsungan hidupnya, untuk mengembangkan kepribadiannya, untuk dapat berbudaya, dan dapat mengembangkan sifat-sifat manusiawinya.

Kesejahteraan sosial dewasa ini lebih ditujukan guna mencapai produktivitas yang maksimum, setiap masyarakat perlu mengembangkan cara-cara meningkatkan kemampuan melindungi masyarakat dari gangguan-gangguan dan masalah-masalah yang dapat mengurangi dan merusak kemampuan yang telah dimiliki (Fadhil Nurdin, 1990:28).

Kesejahteraan masyarakat dalam hal ini, ketika masyarakat mampu menikmati setiap fasilitas yang diadakan oleh PASITABE sebagai lembaga adat, yang nantinya masyarakat dapat menjalankan proses sosial. Untuk itu, perlunya untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai lembaga adat PASITABE.



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis berencana meneliti lebih jauh dengan judul “ **Modal Sosial PASITABE Sebagai Lembaga Adat Dalam Proses Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian :

1. Bagaimana Modal Sosial PASITABE Sebagai Lembaga Adat Dalam Proses Kesejahteraan Masyarakat ?
2. Faktor-faktor yang mendukung proses sosial dalam masyarakat PASITABE?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui modal sosial PASITABE sebagai lembaga adat dalam proses kesejahteraan sosial.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung proses sosial dalam masyarakat PASITABE.

Ada pula kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi (S1) pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin.
2. Sebagai informasi tambahan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan masyarakat PASITABE dan berguna bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu sosiologi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Struktural Fungsional tentang Modal Sosial**

Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar.

Dalam arti paling mendasar, istilah ini menekankan "upaya untuk menghubungkan, sebisa mungkin, dengan setiap fitur, adat, atau praktik, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif." Bagi Talcott Parsons, "fungsionalisme struktural" mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran.

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian

sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini (fungsional–struktural) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya.

Fungsional struktural sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Sistem sosial ialah struktur atau bagian yang saling berhubungan atau posisi-posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan. Struktur lembaga-lembaga itu saling berhubungan sehingga membentuk sistem sosial yang lebih besar, mungkin sebagai kota atau kota besar. Sistem selalu mengalami perubahan karena sistem cenderung kearah keseimbangan maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan (Margaret M. Poloma 2003:28-29).

Dalam M. Farhan Ramli, 2009 menjelaskan bahwa Struktur seringkali dianalogikan dengan organ atau bagian-bagian anggota badan manusia, sedangkan

fungsi menunjuk bagaimana bagian-bagian ini berhubungan dan bergerak. Struktur sosial terdiri dari berbagai komponen dari masyarakat, seperti kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat/lokal dan sebagainya. Kunci untuk memahami konsep struktur adalah konsep status (posisi yang ditentukan secara sosial, yang diperoleh baik karena kelahiran (*ascribed status* maupun karena usaha (*achieved status*) seseorang dalam masyarakat).

Sistem sosial mengembangkan suatu fungsi tertentu dengan fungsi itu memungkinkan masyarakat dan bagi orang-orang yang menjadi anggota masyarakat untuk eksis. Masing-masing menjalankan suatu fungsi yang berguna untuk memelihara dan menstabilkan masyarakat sebagai suatu sistem sosial.

Setiap sistem sosial pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, yaitu : (1) apa yang dapat dilakukan oleh sistem itu dan (2) konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh sistem itu (fungsi lanjutan). Misalnya mata, fungsinya adalah melihat sesuatu dalam lingkungan. Fungsi lanjutan dari mata adalah dengan mata orang dapat belajar, bekerja dan juga dapat melihat datangnya bahaya. Dalam masyarakat, lembaga pemerintahan memiliki fungsi utama menegakkan peraturan, sedangkan fungsi lanjutannya adalah menggerakkan roda perekonomian, menarik pajak, menyediakan berbagai fasilitas sosial dan sebagainya.

Menurut pandangan Robert Merton salah satu tokoh perspektif ini, suatu sistem sosial dapat memiliki dua fungsi yaitu fungsi manifest, yaitu fungsi yang diharapkan

dan diakui, serta fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak diharapkan dan tidak diakui. Lembaga pendidikan sekolah taman kanak-kanak misalnya memiliki fungsi manifes untuk memberikan dasar-dasar pendidikan bagi anak sebelum ke jenjang sekolah dasar. Fungsi latennya, memberi pekerjaan bagi guru TK, membantu orang tua mengasuh anak selagi orang tuanya bekerja dan sebagainya.

Dalam pandangan Robert Merton, tidak semua hal dalam sistem selalu fungsional, artinya tidak semua hal selalu memelihara kelangsungan sistem. Beberapa hal telah menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dalam sistem, bahkan dapat saja menyebabkan rusaknya sistem. Ini oleh Merton disebut dengan disfungsi. Misalnya tingkat interaksi yang tinggi dan kaku dalam keluarga dapat menghasilkan disfungsi, antara lain dalam bentuk kekerasan dan perlakuan kasar atau penyiksaan pada anak.

Para penganut perspektif struktural fungsional ini berusaha untuk mengetahui bagian-bagian atau komponen-komponen dari suatu sistem dan berusaha memahami bagaimana bagian-bagian ini saling berhubungan satu sama lain suatu susunan dari bagian-bagian tersebut dengan melihat fungsi manifes maupun fungsi latennya. Kemudian mereka melakukan analisis mengenai manakah yang memberi sumbangan bagi terciptanya kelestarian sistem dan manakah yang justru menyebabkan kerusakan pada sistem. Dalam hal ini dapat saja suatu komponen menjadi fungsional dalam suatu sistem, tetapi menjadi tidak fungsional bagi sistem yang lain. Misalnya ketaatan pada suatu agama merupakan sesuatu yang fungsional dalam pembinaan umat

beragama, tetapi tidak fungsional bagi pengembangan persatuan berbagai etnik yang beragam agamanya.

Dalam pandangan perspektif struktural fungsional ini, suatu sistem sosial eksis karena sistem sosial itu menjalankan fungsinya yang berguna bagi masyarakat. Pusat perhatian perspektif ini juga tertuju pada masalah tatanan (order) dan stabilitas, yang karena perhatiannya pada hal ini mereka dikritik mempertahankan status-quo. Karena perhatiannya tertuju pada keseimbangan dan kelestarian sistem, perspektif ini juga sering dikritik mengabaikan proses perubahan yang terjadi dalam sistem sosial.

Merton telah mengutip tiga postulat yang ia kutip dari analisa fungsional dan disempurnakannya, diantaranya ialah :

1. *Postulat pertama*, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain.

2. *postulat kedua*, yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan.
3. *postulat ketiga*, yaitu *indispensability* yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur ( dalam artian tak memiliki kejelasan, pen ), belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan.

Talcott Parsons (1902-1979) mensistemasi rumusan-rumusan terdahulu tentang pendekatan fungsionalis terhadap sosiologi. Parsons mengawali dari masalah aturan yang dikemukakan filsuf terdahulu Thomas Hobbes (1585-1679). Hobbes mengatakan bahwa manusia mungkin secara alamiah saling mencakar satu sama lain kecuali jika dikontrol dan dikekang secara sosial. Berpijak dari pandangan itu, Parsons mengembangkan Teori Sistem (1951) yang menguraikan panjang lebar tentang apa yang disebut prasyarat fungsional bagi keberlangsungan sebuah masyarakat.



Suatu fungsi (function) adalah “kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem” (Rocher, 1975:40). Dengan menggunakan definisi ini, parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem—*adaptation (A)*, *goal attainment (G)*, *integration (I)*, dan *latensi (L)* atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperative fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan (*survive*), suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini :

1. Adaptation (Adaptasi) : sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Goal attainment (Pencapaian tujuan) : sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integration (Integrasi) : sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
4. Latency (latensi atau pemeliharaan pola) : sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola cultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam sistem teoritisnya (George Ritzer-Douglas J. Goodman 2008:121).

### ❖ **Prinsip-Prinsip Pokok Fungsionalisme Struktural**

Secara essensial prinsip-prinsip pokok fungsionalisme struktural menurut Stephen K. Sanderson (1993:9) adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian saling berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
2. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.
3. Semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
4. Masyarakat cenderung mengarah kepada satu keadaan equilibrium atau homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagian cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat tetapi bila itu terjadi juga maka perubahan itu pada umumnya akan membawa kepada konsekwensi-konsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Satu hal penting yang dapat disimpulkan adalah bahwa masyarakat menurut kaca mata teori ini (fungsional struktural) senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur yang ada, fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula semua institusi yang ada, diperlukan oleh sistem sosial itu, bahkan kemiskinan serta kepincangan sosial sekalipun. Masyarakat dilihat dalam kondisi : dinamika dalam keseimbangan (George Ritzer 2001:25).

## **B. Konsep dan Pengertian Modal Sosial**

Dalam duniaidealku, 2011 menjelaskan bahwa sebuah konsep dapat bermakna dan berubah melampaui arti/makna aslinya. Namun, biasanya pemahaman kita terhadap sesuatu dapat dikembangkan dengan mengetahui makna turunannya itu. Etimologi dari kata “sosial” seharusnya dapat membantu kita memahami apa arti modal sosial dan bagaimana ia berbeda dari bentuk-bentuk kapital lainnya?

Kata “sosial” adalah salah satu kata sifat yang paling luas digunakan dalam bahasa Inggris. Ini terkait dengan kata benda “masyarakat” yang berasal dari bahasa Latin “*socius*” yang berarti “teman atau kawan”. Hal ini mengindikasikan bahwa apa itu “sosial” aslinya diturunkan dari fenomena “pertemanan”, yang menyiratkan makna kerjasama, solidaritas, saling respek/menghargai, dan kepekaan terhadap kepentingan umum.

Segala bentuk “kapital/modal” dapat dipahami sebagai aset-aset dari berbagai macam hal dan ia dapat diciptakan. Aset adalah segala sesuatu yang dapat

mengalirkan manfaat untuk membuat proses produktif di masa mendatang lebih efisien, efektif, inovatif dan dapat diperluas/disebarkan dengan mudah. Modal sosial adalah akumulasi dari beragam tipe sosial, psikologis, budaya, kognitif, kelembagaan, dan aset-aset yang terkait yang dapat meningkatkan kemungkinan manfaat bersama dari perilaku kerjasama.

Modal sosial dapat dipahami dengan lebih mudah ke dalam dua kategori yang saling berhubungan, yaitu a) struktural dan b) kognitif. Dua kategori ini sangat mendasar untuk memahami modal sosial. Kategori struktural berkaitan dengan beragam bentuk organisasi sosial, khususnya peran-peran, aturan-aturan, preseden, dan prosedur-prosedur serta beragam jaringan-jaringan yang mendukung kerjasama yang memberikan manfaat bersama dari tindakan kolektif. Kategori kognitif datang dari proses mental yang menghasilkan gagasan/pemikiran yang diperkuat oleh budaya dan ideologi – norma-norma, nilai-nilai, sikap dan keyakinan – yang berkontribusi pada terciptanya perilaku kerjasama dan MBCA ( *Mutually Beneficial Collective Action* = Manfaat Bersama dari Tindakan Kolektif ).

Ada beberapa konsep dan pengertian yang dikemukakan oleh para tokoh tentang Modal Sosial yaitu :

1. Robert D Putnam (2000) memberikan proposisi bahwa suatu entitas masyarakat yang memiliki kebajikan sosial yang tinggi, tetapi hidup secara sosial terisolasi akan dipandang sebagai masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah.

2. Randall Collin (1981) melakukan kajian tentang apa yang dia sebut sebagai phenomena mikro dari interaksi sosial yaitu norma dan jaringan (*the norms and networks*) yang sangat berpengaruh pada kehidupan organisasi sosial. Norma yang terbentuk dari berulangnya pola pergaulan keseharian akan menciptakan aturan-aturan tersendiri dalam suatu masyarakat. Aturan yang terbentuk tersebut kemudian akan menjadi dasar yang kuat dalam setiap proses transaksi sosial, dan akan sangat membantu menjadikan berbagai urusan sosial lebih efisien. Ketika norma ini kemudian menjadi norma asosiasi atau norma kelompok, akan sangat banyak manfaatnya dan menguntungkan kehidupan institusi sosial tersebut. Kekuatan-kekuatan sosial dalam melakukan interaksi antar kelompok akan terbentuk. Pada akhirnya mempermudah upaya mencapai kemajuan bersama.
3. Bank Dunia (1999) mendefinisikan Modal Sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi insitusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukan sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (*underpinning*) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas, yaitu sebagai perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.
4. Cohen dan Prusak (2001) memberikan pengertian bahwa Modal Sosial sebagai stok dari hubungan yang aktif antar masyarakat. Setiap pola hubungan yang terjadi diikat oleh kepercayaan (*trust*), kesaling pengertian (*mutual*

*understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

5. Eva Cox (1995) mendefinisikan Modal Sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.

Masing-masing tokoh yang mempopulerkan konsep Modal Sosial memiliki perbedaan penekanan terhadap unsur-unsur yang membentuknya. Perbedaan tersebut juga dalam hal pendekatan analisis. Tetapi apa pun perbedaan tersebut, intinya konsep Modal Sosial memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas kehidupan dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus-menerus.

Dalam proses perubahan dan upaya untuk mencapai tujuan, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak dan bertingkah laku serta berhubungan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh Modal Sosial antara lain sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya-mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peran penting adalah kemauan masyarakat atau kelompok tersebut untuk secara terus-menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan-jaringan kerjasama maupun dengan

penciptaan kreasi dan ide-ide baru. Inilah jatidiri Modal Sosial yang sebenarnya (J. Hasbullah 2006:6-8).

#### ❖ **Unsur Pokok Modal Sosial**

Dalam Pustaka Unpad menjelaskan bahwa Modal sosial dibentuk oleh unsur-unsur pokok yang terdiri dari : (1) partisipasi dalam suatu jaringan; (2) *reciprocity*; (3) *trust*; (4) norma sosial; (5) nilai; dan (6) tindakan yang proaktif. Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya.

Pada kelompok sosial yang terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis keturunan (*lineage*), pengalaman-pengalaman sosial turun temurun (*repeated social experiences*) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi ketuhanan (*religious beliefs*) cenderung memiliki kohesivitas tinggi, tetapi rentang jaringan maupun *trust* yang terbangun sangat sempit. Sebaliknya, pada kelompok yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dan dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang lebih luas. Modal sosial yang demikian akan lebih banyak mendatangkan dampak positif bagi kemajuan kelompok maupun kontribusinya pada pembangunan masyarakat secara luas.

### C. Lembaga Sosial (Lembaga Kemasyarakatan)

#### ❖ Pengertian Lembaga Sosial

Pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah *social institution*, namun *social institution* juga diterjemahkan sebagai pranata sosial. Hal ini dikarenakan *social institution* merujuk pada perlakuan mengatur perilaku para anggota masyarakat. Ada pendapat lain mengemukakan bahwa pranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaraningrat Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah lain yang digunakan adalah bangunan sosial yang diambil dari bahasa Jerman *sozialegebilde* dimana menggambarkan dan susunan institusi tersebut.

Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu :

1. Cara (*usage*) lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungkannya.



2. Kebiasaan (*folkways*) mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
3. Tata kelakuan (*mores*) mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
4. Adat-istiadat (*custom*), tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkat kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan.

### ❖ Jenis-jenis Lembaga Sosial

Ada 4 jenis lembaga sosial, yakni :

#### **1. Pranata Pendidikan**

Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut:

- Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
- Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
- Melestarikan kebudayaan.
- Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut.

- Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.
- Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka.
- Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.

- Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.

Menurut David Popenoe, ada empat macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut:

- Transmisi (pemindahan) kebudayaan.
- Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
- Menjamin integrasi sosial.
- Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
- Sumber inovasi sosial.

## **2. Pranata Ekonomi**

### **❖ Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi**

Pada hakekatnya tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat.

### **❖ Fungsi dari lembaga ekonomi adalah:**

- Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan.

- Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang/barter.
- Memberi pedoman tentang harga jual beli barang.
- Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja.
- Memberikan pedoman tentang cara pengupahan.
- Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja.
- Memberi identitas bagi masyarakat.

### **3. Pranata Agama**

Pranata Agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan.

❖ Fungsi pranata agama adalah:

- Sebagai pedoman hidup.
- Sumber kebenaran.
- Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan.
- Tuntutan prinsip benar dan salah.

- Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama.
- Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala, walaupun perbuatannya sekecil apapun.
- Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata.
- Pengungkapan estetika manusia cenderung menyukai keindahan karena keindahan merupakan bagian dari jiwa manusia.
- Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama.

#### **4. Pranata Politik**

Pranata politik merupakan pranata yang menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Pranata yang merupakan pembantunya adalah seperti sistem hukum dan perundang-undangan, kepolisian, angkatan bersenjata, kepegawaian, kepartaian, hubungan diplomatik. Bentuk pranata atau institusi politik yang mengkoordinasi segala kegiatan diatas disebut negara. Fungsi lembaga politik :

- Pelembagaan norma melalui Undang-Undang yang disampaikan oleh badan-badan legislatif.
- Melaksanakan Undang-Undang yang telah disetujui.
- Menyelesaikan konflik yang terjadi diantara para warga masyarakat yang bersangkutan.
- Menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan seterusnya.
- Melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain.
- Memelihara kesiapsiagaan/kewaspadaan menghadapi bahaya.

#### ❖ **Peran dan Fungsi Lembaga Sosial**

Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Fungsi-fungsinya diatas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu, maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2010:173).

#### **D. Konsep Kesejahteraan Sosial**

##### **❖ Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya. Salah satu landasan hukum yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.

Dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa “lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, mencakup antara lain, aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial (dalam arti sempit), dan lain-lain”. Hal ini sesuai dengan pendapat Kamerman dan Kahn (1979) yang menjelaskan 6 komponen atau subsistem dan kesejahteraan sosial, yaitu : (1) pendidikan, (2)

kesehatan, (3) pemeliharaan penghasilan, (4) pelayanan kerja, (5) perumahan, (6) pelayanan sosial personal.

Kesejahteraan sosial di dalam berbagai bentuk kegiatannya meliputi semua bentuk intervensi sosial, terutama ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai keseluruhan. Dapat pula mencakup upaya dan kegiatan-kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk penyembuhan, pencegahan, masalah-masalah sosial misalnya masalah kemiskinan, penyakit dan disorganisasi sosial, serta pengembangan sumber-sumber manusia.

Mengenai konsep kesejahteraan sosial, perlu didapat pemahaman. Oleh karena itu, beberapa definisi atau pengertian tentang kesejahteraan sosial dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi atau keadaan sejahtera baik fisik, mental, maupun sosial tertentu saja. Kemudian pengertian tersebut disempurnakan, menjadi: suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal-balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka.
2. Arthur Dunham, mengemukakan kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang usaha manusia, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam badan dan usaha sosial yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial pada bidang-bidang kehidupan keluarga dan anak, kesehatan,



penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial.

3. Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux, mengemukakan pengertian kesejahteraan sosial terdapat dua konsepsi, yakni konsepsi residual dan konsepsi institusional.

1. Konsepsi residual didasarkan kepada dua saluran alami yaitu keluarga dan ekonomi pasar, dimana kedua saluran ini dapat menjamin pemenuhan kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat.

2. Konsepsi institusional, dasar pandangannya bahwa kehidupan masyarakat modern sangat kompleks, sehingga tidak mungkin setiap individu dapat memenuhi semua kebutuhannya, baik melalui keluarga maupun lingkungan kerjanya, hal itu dianggap suatu keadaan normal.

4. Walter A. Friedlander, kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan

kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

5. Menurut UU No. 6 tahun 1974, kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik beberapa pokok pikiran :

1. Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi/keadaan yang sejahtera baik fisik, mental, maupun sosial.
2. Merupakan bidang usaha manusia yang didalamnya terdapat berbagai macam badan, dan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan keluarga, anak, dan masyarakat.
3. Sejak mulai tumbuh dan berkembangnya, konsep kesejahteraan sosial mengalami proses peralihan dari pemikiran residual kepada pemikiran institusional.

4. Kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang terorganisasi (organized system) yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial.
5. Tujuan sistem tersebut ialah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan (perumahan), kesehatan, dan juga relasi-relasi sosial dengan lingkungannya.
6. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara; meningkatkan kemampuan individu, baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya.
7. Konsep kesejahteraan sosial meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan keterlampiran lahir dan batin.
8. Setelah terpenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat, maka perlu menjunjung tinggi hak-hak serta kewajiban manusia sesuai dengan falsafah pancasila.

#### ❖ Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial adalah mengorganisasikan dari adanya disorganisasi. Pengertian reorganisasi mempunyai ukuran yang cukup luas dan

mendalam sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang mencakup pemulihan serta pemberian peranan-peranan baru.

### **1. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)**

Kesejahteraan sosial melaksanakan fungsi penyembuhan bila di dalamnya tercakup sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi, ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi secara normal kembali di dalam masyarakat.

Disamping fungsi penyembuhan tercakup pula pengertian fungsi pemulihan (rehabilitasi) terutama untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsi sosial, baik dalam diri individu maupun kelompok dan masyarakat. Sifat represif dari fungsi penyembuhan digunakan untuk menekan agar masalah sosial yang timbul tidak semakin parah dan menjalar.

### **2. Fungsi Pencegahan (*Preventif*)**

Kesejahteraan sosial yang bersifat pencegahan ditujukan untuk memperkuat keluarga, kelompok-kelompok, dan kesatuan-kesatuan masyarakat agar jangan sampai timbul masalah-masalah sosial yang baru. Disamping itu juga diusahakan pencegahan tingkah laku perorangan yang abnormal.

Didalam masyarakat-masyarakat yang mengalami perubahan cepat, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

### **3. Fungsi Pengembangan (*Development*)**

Kegiatan kesejahteraan sosial yang bersifat pengembangan tujuan-tujuan dan orientasinya untuk memberikan sumbangan langsung bagi proses pembangunan. Dalam hal ini kesejahteraan sosial bertindak sebagai suatu unsur pelaksana perubahan (*change agent*), yaitu membantu peningkatan proses perubahan sosial berencana. Perubahan ini dapat mempengaruhi struktur dan fungsi-fungsi keluarga serta masyarakat, sehingga anggota-anggotanya perlu disiapkan untuk memperoleh dan melaksanakan peranan-peranan serta tanggung jawab yang baru.

### **4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)**

Kesejahteraan sosial pada fungsi penunjang ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan-tujuan sektor lain. Misalnya ikut bertransmigrasi berarti mengurangi penduduk disuatu tempat yang selama ini merupakan masalah yang sangat berat yang dikenal padat penduduknya (Fadhil Nurdin 1990:27-36).

## ❖ **Bentuk-bentuk Intervensi Kesejahteraan Sosial**

Dalam buku pengantar kesejahteraan sosial yang ditulis oleh Fadhil Nurdin menjelaskan tentang sistem kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh badan-badan atau lembaga kesejahteraan sosial, terdiri dari bentuk-bentuk intervensi sosial utama yang dapat dikategorikan:

### **1. Analisis dan Perencanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial**

Kegiatan ini berhubungan dengan pengembangan perundang-undangan serta peraturan-peraturan sosial baik yang diatur maupun mengatur usaha-usaha pemerintah maupun swasta. Perencanaan sosial, pengorganisasian dan perencanaan masyarakat semuanya memberikan bantuan dalam perumusan dan pembentukan rencana-rencana, kebijaksanaan, serta program-program pemerintah maupun swasta seperti ; sistem jaminan sosial, asuransi, undang-undang perburuhan, badan-badan dana, dan kesejahteraan lokal.

### **2. Program-program perbaikan penghasilan**

Program-program perbaikan penghasilan berhubungan dengan penyediaan jaminan dan bantuan finansial, seperti misalnya tunjangan pengangguran sosial, pensiun, bantuan anak-anak bidang keuangan, bantuan bagi korban bencana alam, bantuan bagi keluarga-keluarga miskin. Penyediaan bantuan seperti itu terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi serta memelihara standard hidup

minimal, meredistribusi sumber-sumber ekonomi, serta mengurangi masalah ketidakmerataan sosial ekonomi.

### **3. Program-program Pelayanan Sosial**

Pelayanan-pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi kasus yang dilaksanakan secara diindividualisasikan, langsung dan terorganisasi, yang bertujuan membantu individu atau kelompok dan lingkungan sosial dalam upaya mencapai saling penyesuaian.

Bentuk-bentuk pelayanan sosial sesuai dengan fungsi-fungsinya adalah:

- a. *Pelayanan askses*, mencakup pelayanan informasi, rujukan, pemberian nasihat, dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar dapat mencapai atau menggunakan pelayanan yang tersedia.
- b. *Pelayanan terapi*, mencakup pertolongan dan terapi atau rehabilitasi, termasuk didalamnya perlindungan dan perawatan. Misalnya pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan kesejahteraan sosial medik dan sekolah, perawatan bagi orang-orang jompo atau lanjut usia.
- c. *Pelayanan sosialisasi dan pengembangan*, misalnya taman penitipan bayi dan anak, keluarga berencana, pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi

bagi pemuda, dan kegiatan masyarakat yang dipusatkan (*community centre*).

#### **4. Administrasi Kesejahteraan Sosial**

Administrasi kesejahteraan sosial berhubungan dengan pengorganisasian, persiapan, serta pengelolaan kebijakan, perbaikan penghasilan, dan untuk pelayanan-pelayanan sosial. Fungsi pengelolaan dari administrasi kesejahteraan sosial mencakup; penyediaan program-program pendidikan dan latihan, baik di dalam badan-badan sosial atau melalui pendidikan tinggi kesejahteraan sosial yang bertujuan menghasilkan dan mengembangkan tenaga-tenaga pelaksana untuk berbagai jenis dan tingkat posisi dalam bidang kesejahteraan sosial.

Jadi, administrasi kesejahteraan sosial terutama ditujukan untuk mencapai pelaksanaan pelayanan yang efisien dan efektif, sehingga sistem pelayanan tersebut secara jelas dapat mewujudkan kebijaksanaan sosial dengan mutu tinggi, secara sosial dapat diperhitungkan dan diukur manfaatnya, serta responsif terhadap masalah-masalah sosial yang hendak dipecahkan atau diselesaikan.

#### **5. Aksi Sosial**

Aksi sosial terdiri dari usaha-usaha pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat guna membantu memecahkan persoalan-persoalan umum serta masalah-masalah sosial serta untuk mempengaruhi perbaikan kelembagaan sosial dan



perubahan-perubahan sosial. Kegiatan-kegiatan kepemimpinan, pembelaan, dan dukungan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, redistribusi kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber sosial, serta untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap norma-norma sosiokultural.

Jenis atau corak-corak intervensi seperti digambarkan diatas dilaksanakan dalam bentuk pelayanan-pelayanan dan usaha-usaha kesejahteraan sosial institusional. Usaha-usaha ini merupakan respons-respons terencana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tugas-tugas yang dihadapi oleh individu-individu dan keluarga-keluarga selama karir hidupnya pada tiap tahap perkembangan hidupnya. Intervensi-intervensi ini juga merupakan usaha untuk menolong individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah serta krisis-krisis yang timbul di dalam setiap tahap perkembangan hidupnya (Fadhil Nurdin 1990:49-51).

### ❖ Konsep Proses Sosial

Dalam Alhada-fisip11-unair menjelaskan mengenai proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal-balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh-

mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan seterusnya.

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama.

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan sebagai proses sosial) karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai suatu kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya.

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih mencolok ketika terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila manusia mengadakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap sistem interaksinya.

### **E. Konsep PASITABE sebagai Modal Sosial**

PASITABE adalah sebuah konsorsium budaya yang dibentuk oleh sejumlah etnis lokal yang berdiam di ujung utara Sulawesi Selatan. Wilayah tersebut saat ini berada dalam kawasan Kabupaten Luwu Timur. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah, serta Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara, membuat wilayah Luwu Timur unik karena dihuni oleh beberapa etnis, ada yang serumpun dan tersebar di tiga provinsi tersebut, juga ada etnis pendatang yang tiba oleh arus perdagangan maupun industri.

Demikianlah, konsorsium budaya PASITABE (selalu ditulis dengan huruf besar) dibentuk oleh tiga etnis serumpun yaitu Padoe, Karunsie dan Tambee. Dari suku kata nama ketiga suku tersebutlah muncul nama PASITABE (**PA**doe, Karun**SI**e, **TAmBEE**). Terbentuknya PASITABE ini tentu saja didukung juga oleh alasan sejarah. Pergolakan yang terjadi di Sulawesi pada dekade 50 hingga 60-an, yang didalangi oleh DI-TII dan Permesta, membuat wilayah Sulawesi cukup porak-poranda, baik tatanan sosial, ekonomi maupun infrastrukturnya. Tak sedikit kelompok masyarakat yang harus eksodus dari kampung halamannya; lari menyelamatkan diri ke hutan-hutan atau ke kampung lain, bahkan menyeberang hingga ke lain provinsi.

Etnis Padoe, Karunsie dan Tambee pun terlibas dampak pergolakan tersebut. Rombongan pengungsi yang berjalan lewat hutan dan padang, berbondong-bondong

meninggalkan tanah tumpah darah; tanah yang mereka sebut sebagai TANAH NUHA. Lalu bertahun-tahun mereka hidup dalam kenangan; kenangan akan TANAH NUHA itu.

Ketika masa telah aman, pada akhir 60-an hingga awal 70-an, terjadilah arus balik ke TANAH NUHA. Etnis Padoe, Karunsie dan Tambee kini menemukan kampung mereka telah berubah oleh pergolakan yang panjang. Sawah dan ladang hancur tak terurus, lumbung penyimpanan padi habis terkuras, rumah pun lenyap terbakar, bahkan sejumlah sanak saudara tak lagi dapat ditemukan karena menjadi korban pergolakan. Tak banyak yang tersisa, semua hilang dan lenyap. Termasuk semangat dan keberanian yang pernah ada.

Memang tak mudah untuk membangun kembali apa yang telah hancur. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memompa semangat agar bangkit dari kehancuran. Dibutuhkan waktu pula untuk menata kembali jajaran persawahan, ladang dan perkebunan yang perlahan telah berubah menjadi hutan. Bertahun juga untuk memelihara dan membiakkan kembali ternak dan unggas yang pernah ada.

Rumah dan pakaian adat telah habis terbakar. Yang tersisa pun telah lapuk dimakan masa. Sungguh tak banyak yang tersisa. Hanya nyanyian tentang kampung halaman dan tarian syukur yang mengiringinya. Tak banyak yang tertinggal, selain ingatan akan irama tabuhan gendang dan gong; yang pun tak serta merta dapat

dimainkan karena gong dan gendang itu telah tercecer di hutan saat menyelamatkan diri.

Walaupun demikian, dan apa pun keadaannya, mereka kini telah kembali ke TANAH NUHA. Bersatu asa dengan semangat TEPOASO KATO MEMOROSO (dengan bersatu kita menjadi kuat) dan rasa senasib sepenanggungan mulai memudarkan batas-batas perbedaan dan trauma akibat penderitaan. Mereka mencoba untuk bersama-sama menata hidup kembali.

Dengan semangat itu pulalah, generasi tersisa dari ketiga etnis tersebut, pada dekade 80-an membentuk konsorsium kebudayaan PASITABE. Mereka berharap dapat menegakkan kembali kebudayaan dan adat dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Hukum adat, megahnya kebudayaan, tatanan sosial masyarakat dan kepemimpinan, serta kesenian tradisional haruslah mendapatkan kawalan dari sebuah sinergi yang dapat diandalkan. Konsorsium pun mendapat tempatnya.

Alasan pemberdayaan perekonomian masyarakat tentu saja turut menggerakkan terbentuknya konsorsium ini. Diperuncing oleh arus kedatangan etnis-etnis lain oleh gerakan perdagangan dan industri, tentu saja membuat tantangan perekonomian masyarakat lokal TANAH NUHA ini menjadi semakin berat. Konsorsium dibentuk untuk salah satunya diharapkan berperan dan mengambil andil di dalam era persaingan dan pra-modern tersebut. Menyelamatkan kaum sebelum saatnya mereka dapat kembali berdiri di atas kaki sendiri.

Begitulah yang terjadi, tahun demi tahun setelahnya. Melewati dekade 90-an, di pengujung abad 20 konsorsium tampaknya telah menyuntik semakin banyak ruh dan semangat ke dalam darah kaumnya. Budaya dan kesenian kembali ditegakkan; pun diperkenalkan hingga anak dan cucu. Hukum dan aturan adat dibuhulkan, sehingga masyarakat terkelola kembali oleh segelintir pemuka dan tokoh adat yang tersisa.

Abad 21 baru saja memulai tahun-tahunnya ketika zaman telah benar-benar berubah. Seiring itu, generasi baru pun tampil ke depan. Gerakan kebudayaan kini mulai lahir dari jiwa muda yang menapaki tangga naik ke pentas. Ketiga etnis mulai kembali menemukan formatnya; atau mungkin sekadar jiwa muda itulah yang ingin menambatkan diri entah ke mana kebudayaan dan citra dirinya.

Bagaimanapun, konsorsium telah menjadi pengawal kebangkitan kebudayaan ini. Bagaikan panah dengan anak panahnya, PASITABE kini melahirkan kesadaran budaya dan adat istiadat, citra diri dan wibawa pada jiwa generasi baru Padoe, Karunsie dan Tambee. PASITABE telah membuat mereka mulai mengenal warnanya masing-masing; PASITABE telah membentuk dan mengantarkan jiwa-jiwa baru ini, dengan tangannya yang tak terlihat.

Bagaikan ibu angkat dengan anaknya yang laki-laki dan perempuan, suatu saat nanti PASITABE akan melepaskan ketiga anak angkatnya untuk berlari sendiri menuju nasibnya masing-masing.

Tentu saja, gerakan kebudayaan, bagaimana pun, merupakan salah satu alat ampuh dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Tak peduli format apa yang muncul pertama kali, atau kedua, ketiga, dan keempat kali dalam perkembangan dan upaya konservasinya, tetap saja semangat sejati sebuah kebudayaan yang dilahirkan, dijaga dan dikembangkan akan membuatnya awet dan kekal; walau mungkin kita dapat melihat berbagai perbedaan yang disebabkan oleh evolusi yang telah terjadi.

Dari konsorsium PASITABE yang diuraikan dalam bagian diatas, dimana setelah berakhirnya masa-masa pergolakan yang dialami oleh ketiga anak suku yang kemudian membentuk lembaga adat PASITABE ini, memperlihatkan suatu pergolakan yang membuat segala yang ada hilang dan lenyap akibat pergolakan, namun tidak terlalu lama berlarut dalam pergolakan tersebut, mereka akhirnya bangkit kembali membentuk tatanan kehidupan yang baru. Mereka kembali ke tanah Nuha, dan memulai untuk menata kembali kehidupan dengan membangun kembali kebudayaan, memperkenalkan kepada anak cucu, hukum adat kembali ditata untuk mengatur kehidupan masyarakat PASITABE.

Bertahun-tahun berlalu dan semakin banyak perubahan dan penataan kembali akan tanah nenek moyang mereka. Kesatuan dalam keserumpunan merupakan sebuah keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Masyarakat Adat PASITABE sehingga diperlukan sebuah sistem kelembagaan, sebagai bagian revitalisasi, yang dapat

menjaga nilai sejarah, adat istiadat, kebiasaan, kearifan lokal, sistem nilai agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat adat PASITABE dan Republik ini. Dari hal tersebutlah musyawarah adat dilaksanakan, dan pada tahun 2011, Musyawarah Adat PASITABE yang ke-empat dilaksanakan di Kecamatan Wasuponda yang bertujuan untuk mempererat ikatan tiga Anak Suku yang hingga saat ini tetap masih eksis mempertahankan budaya leluhur.

Lembaga adat PASITABE, terus berbenah diri untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bangkit dari masa-masa sulit yang dialami sebelumnya. Sebagaimana tujuan dari PASITABE yaitu :

1. Mengelola tatanan hidup Masyarakat Adat Padoe, Karunsi'e, Tambee sesuai dengan tatanan adat dan budaya yang telah disepakati turun temurun;
2. Menjaga tanah ulayat dan memelihara keberadaan Adat dan Budaya sebagai sumber nilai kearifan yang permanen.
3. Mendorong percepatan pembangunan Masyarakat Adat PASITABE yang bermuka pada peningkatan indeks Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, seni budaya, tenaga kerja, serta mendorong keberlangsungan lingkungan hidup;

Sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai aturan nilai dan norma, dalam lembaga adat PASITABE terdapat juga aturan-aturan yang mengatur masyarakat untuk dapat melaksanakan proses sosialnya. Aturan tersebut dinamakan



hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

Lembaga adat PASITABE, sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat, tentunya harus mempunyai hubungan yang kuat dalam masyarakat. Ini yang dinamakan modal sosial. Modal sosial disini yaitu hubungan dalam masyarakat yang memudahkan untuk menjalankan kerjasama dan yang menjadi ukuran dalam modal sosial seperti kepercayaan, tanggung jawab, keadilan, gotong-royong dan lainnya.

Modal sosial juga akan memiliki pengaruh yang kuat pada kehidupan organisasi modern. Cohen dan Prusak (2001) misalnya mengemukakan bahwa keuntungan yang akan diperoleh suatu organisasi modern antara lain akan meningkatkan pengetahuan bersama terutama berkaitan dengan adanya relasi-relasi yang dibangun atas modal kepercayaan. Para anggota organisasi akan memiliki acuan bertindak yang sama dan secara bersama-sama pula mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya modal sosial yang kuat akan mempermudah biaya berbagai bentuk transaksi terutama kaitannya dengan rasa saling percaya yang tinggi dan kuatnya spirit kebersamaan. Apakah kebersamaan dalam organisasi maupun kebersamaan antar organisasi dengan relasi di luarnya. Modal sosial akan

memperbesar tingkat koherensi tindakan berkaitan dengan stabilnya organisasi dan adanya kesaling pengertian bersama.

Masyarakat yang memiliki modal sosial kuat dan memiliki asosiasi-asosiasi informal yang kuat akan mampu pula mendorong kemampuan organisasi-organisasi modern yang juga kuat. Para anggota organisasi-organisasi yang dibentuk akan terbiasa dengan nilai dan norma serta berhubungan dengan sesama atas prinsip-prinsip keterbukaan, etika yang tinggi akan mampu memperlebar jaringan-jaringan interaksi guna memperkuat jaringan organisasi yang dibentuk. Adapun bentuk organisasinya jika didirikan diatas pondasi masyarakat yang memiliki rasa saling percaya yang tinggi akan mendorong perkembangan organisasi tersebut dengan cepat dan positif.

Lebih jauh seperti yang dikemukakan oleh Wool Cock (1998), jika suatu organisasi memiliki dua hal sekaligus yaitu derajat kerekatan (*embeddedness*) dan kemandirian (*autonomy*) yang tinggi akan berpeluang menciptakan organisasi-organisasi modern yang berkarakter dan memiliki integritas yang juga tinggi. Kenyataan ini akan memiliki pengaruh timbal-balik kepada masyarakat. Mereka yang memiliki organisasi modern dan kuat akan merangsang tidak saja dipertahankannya modal sosial di masyarakat yang telah tumbuh sebelumnya, tetapi juga akan memperkuat apa yang telah ada.

Perubahan-perubahan besar yang mempengaruhi kemajuan masyarakat hanya di mungkinakan jika, apakah itu organisasi asosiasi informal yang tumbuh dari

masyarakat setempat dan organisasi modern yang kemungkinan tumbuh dan datang dari pengaruh luar masyarakat tersebut, memiliki daya kuat untuk menjadi katalisator perubahan. Mereka akan kuat apabila masyarakat itu sendiri memiliki modal sosial yang juga kuat (J. Hasbullah 2006).

#### **F. Kerangka Konseptual**

Modal sosial adalah bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial juga didefinisikan sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama.

Hubungan timbal balik secara kuat antar warga masyarakat yang memudahkan orang bekerjasama inilah yang disebut sebagai modal sosial. Modal sosial ini menjadi sarana untuk menyatukan gerak langkah dalam berbagai macam aktivitas bersama baik didalam masyarakat itu sendiri maupun dengan masyarakat lain. Aktivitas yang disatukan oleh modal sosial akan lebih kuat dan berhasil dibandingkan dengan yang tidak.

Modal sosial merupakan sarana agar terjadi keikatan yang kokoh dalam membangun suatu masyarakat . Ada dua kategori dalam modal sosial yaitu yang menekankan pada jaringan hubungan sosial dan menekankan pada karakteristik yang melekat pada diri individu yang terlibat dalam interaksi sosial. Kategori pertama yang menekankan pada jaringan hubungan sosial yang diikat oleh kepemilikan informasi, rasa percaya, saling memahami, dan kesamaan nilai, dan saling mendukung.

Menurut pandangan kelompok ini modal sosial akan semakin kuat apabila sebuah komunitas atau organisasi memiliki jaringan hubungan kerjasama, baik secara internal komunitas/organisasi, atau hubungan kerjasama yang bersifat antar komunitas/organisasi. Jaringan kerjasama yang sinergistik yang merupakan modal sosial akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan bersama. Sedangkan kategori kedua diwakili oleh teori kepribadian (*traits theorist*) yang melihat bahwa munculnya suatu kelompok kerja yang kohesif baru akan terjadi kalau individu memiliki sifat kepribadian tertentu yang mendukung interaksi sosial.

Modal sosial sangat diperlukan oleh masyarakat agar terjaga kelangsungan hidupnya dalam menghadapi gelombang yang dahsyat dalam era teknologi informasi. Meskipun tatap muka sudah semakin jarang, komunikasi diharapkan masih tetap ada melalui jalur multimedia. Kualitas masyarakat yang modal sosialnya tinggi diwarnai oleh adanya konsep, kompetensi, koneksi, kredibilitas dan kepedulian. Beberapa upaya penting untuk meningkatkan modal sosial yaitu melalui pelatihan dalam setting kelompok, pendidikan karakter, silaturahmi, pendidikan sekolah dan keluarga.

Dalam buku SOCIAL CAPITAL (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)

J. Hasbullah menulis,

*Francis Fukuyama (1999) dengan menyakinkan berargumentasi bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern (J. Hasbullah, 2006:3).*

Modal sosial membentuk suatu jaringan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat.

Dalam suatu lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan, dengan mengedepankan modal sosial dalam masyarakat, tentunya akan membantu masyarakat itu sendiri dalam menghadapi permasalahan. Adanya hubungan yang erat dan kuat serta kerjasama dalam setiap anggota masyarakat, pastinya membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan masyarakat selanjutnya.

Soekanto (1984) mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar dari norma kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Sementara Bertrand (1980) mengemukakan bahwa institusi sosial pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial (struktur sosial) yang telah di ciptakan untuk dapat melaksanakan fungsi masyarakat. Dan Roucek dan Warren (1964) mengemukakan

bahwa institusi adalah pola-pola (patterns) yang telah mempunyai kedudukan tetap atau pasti untuk mempertemukan berbagai macam kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dari cara-cara yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi (Riyadi Soeprapto, 2002).

Lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan yang didalamnya terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosial yang harus dipatuhi setiap masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dianggap sungguh-sungguh berlaku apabila norma-norma sepenuhnya membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Suatu norma dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut :

1. Diketahui,
2. Dipahami atau dimengerti,
3. Ditaati,
4. Dihargai,

Keberhasilan proses institusinalisasi dalam masyarakat dilihat jika norma-norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi terlembaga dalam masyarakat, akan tetapi menjadi terpatritasi dalam diri secara sukarela (*internalized*) dimana masyarakat dengan sendirinya ingin berkelakuan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam lembaga adat PASITABE, terdapat aturan-aturan dan tata kelakuan dalam masyarakat yang merupakan pedoman dalam menjalankan setiap proses sosial, dimana aturan yang ada memberikan kontribusi yang kuat dalam masyarakat, sehingga nantinya apa yang terjadi bisa diatasi secara bersama. Sebagaimana fungsi lembaga sosial diatas, pasti setiap lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan menginginkan adanya kesatuan dan keharmonisan didalamnya, sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Masyarakat PASITABE telah beberapa kali menyelenggarakan pesta adat maupun rapat dewan adat. Ini membuktikan bahwa ada keyakinan yang kuat untuk dapat mensejahterakan masyarakat, dan membangun kembali semangat yang telah pudar dan juga membentuk kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Ketika semuanya dilakukan dengan satu kepercayaan bahwa akan ada perubahan yang diidam-idamkan selama ini, menghasilkan kesatuan yang kuat.

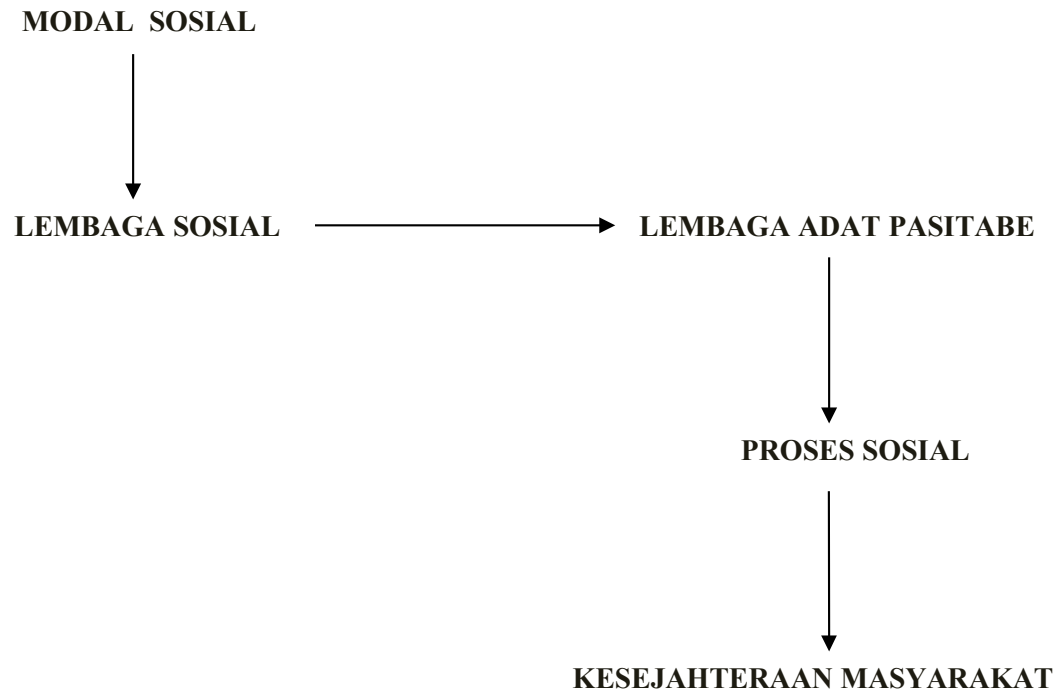
Beragam kegiatan dilakukan untuk lebih mensejahterakan masyarakat PASITABE, kesejahteraan sosial sendiri merupakan semua bentuk intervensi sosial, terutama ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam menjalankan proses sosial dalam masyarakat PASITABE, ada berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk lebih mempererat hubungan antara sesama masyarakat. Dengan begitu

masyarakat akan saling terbuka terhadap segala permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan jalan keluar. Ketika nilai, norma, kerjasama itu dilakukan dengan mengharapkan adanya hasil yang baik yang akan dicapai dalam menjalankan proses sosial.

Masyarakat menginginkan adanya perubahan agar kehidupan mereka semakin baik dan memperoleh kesejahteraan yang sudah semestinya menjadi hak mereka. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh PASITABE sendiri sebagai lembaga adat dalam masyarakat Wasuponda dan sekitarnya yang menjadi perantara terhadap masalah yang dihadapi, mereka memperjuangkan tanah nenek moyang untuk dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri.



#### ❖ Skema Kerangka Konseptual



#### G. Definisi Operasional

1. Modal Sosial yaitu bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial juga didefinisikan sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau

norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama.

2. Menurut Koentjaraningrat Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Dalam Sangkalima, 2007 dijelaskan bahwa Lembaga Adat PASITABE adalah sebuah konsorsium budaya yang dibentuk oleh sejumlah etnis lokal yang berdiam di ujung utara Sulawesi Selatan. Wilayah tersebut saat ini berada dalam kawasan Kabupaten Luwu Timur. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah, serta Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara, membuat wilayah Luwu Timur unik karena dihuni oleh beberapa etnis, ada yang serumpun dan tersebar di tiga provinsi tersebut, juga ada etnis pendatang yang tiba oleh arus perdagangan maupun industri. Dari suku kata nama ketiga suku tersebutlah muncul nama **PASITABE** (**PA**doe, **KarunSI**e, **TA**m**BE**e).
4. Menurut Walter A. Friedlander, kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh

mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Fadhil Nurdin 1990:29).

5. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau dengan perkataan lain proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama (Soerjono Soekanto 2010:55).
6. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan , baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur , mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan yaitu bulan Mei – Juli 2012. Lokasi penelitian yang dipilih dalam hal ini adalah Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur.

#### **B. Tipe dan Dasar Penelitian**

##### **❖ Tipe penelitian.**

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian yang mencakup keseluruhan.

##### **❖ Dasar penelitian**

Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus yakni suatu strategi dalam penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang membutuhkan suatu penjelasan yang sejelas-jelasnya dalam mencari suatu fenomena secara mendalam.

#### **C. Teknik Penentuan Informan**

Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Badan Pengurus PASITABE dan tokoh masyarakat. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu informan yang dipilih atau ditentukan secara sengaja oleh peneliti dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi kriteria dalam penentuan informan yaitu penduduk asli Wasuponda, termasuk dalam struktur pengurus, dan sebagai tokoh masyarakat yang telah lama mendiami daerah tersebut. Pertimbangan dilakukan adalah bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang luas, rinci, dan mendalam sehingga didapat suatu kebenaran yang bermakna dan menyeluruh. Jumlah Informan pada penelitian ini sebanyak 7 orang, terdiri dari

#### D. Teknik pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dari informan adalah:

##### 1) Data primer

Data ini dikumpulkan dengan menggunakan:

- a. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui obyektivitas dari kenyataan yang akan ada tentang keadaan kondisi obyek yang akan diteliti.

b. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara Mendalam, yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi secara mendalam dari informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau peneliti melakukan kontak langsung dengan subyek meneliti secara mendalam utuh dan terperinci.

## 2) Data Sekunder.

Data ini dikumpulkan melalui penelusuran atau studi pustaka dari berbagai arsip-arsip penelitian, artikel-artikel, dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

## E. Teknik Analisi Data.

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam lembaga adat PASITABE.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN LOKASI DAN OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Geografis**

Kecamatan Wasuponda merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, dengan luas wilayah 1.244 km<sup>2</sup>, kecamatan yang terletak disebelah utara Ibukota Kabupaten Luwu Timur.

Batas-batas wilayah :

Sebelah U berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah

Sebelah T berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti

Sebelah S berbatasan dengan Kecamatan Malili dan Angkona

Sebelah B berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana dan Angkona

Kecamatan Wasuponda terdiri dari 6 desa/kelurahan yang seluruhnya berstatus desa definitive. Wilayah Kecamatan Wasuponda adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Wasuponda daerahnya merupakan berbukit-bukit. Letak geografis Kecamatan Wasuponda yaitu 2° 18' 00'' - 2° 49' 30'' LS dan 120° 52' 30'' - 121° 24' 00'' BT.

#### **B. Penduduk**

Kepadatan penduduk di Kecamatan Wasuponda tergolong rendah yaitu sekitar 13 orang per kilometer persegi. Karena berada di bawah rata-rata Kabupaten Luwu Timur yang berkisar 33 orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Wasuponda dengan kepadatan 26 orang per kilometer persegi, sedang paling rendah adalah Desa Kawata dengan kepadatan sekitar 7 orang per kilometer persegi. Pada tahun 2008, jumlah penduduk di Kecamatan Wasuponda sebanyak 16.475 orang yang terbagi ke dalam 3.363 rumah tangga, dengan rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga sebanyak 5 orang.

Pada tahun yang sama jumlah laki-laki lebih banyak dengan perempuan. Laki-laki sebanyak 8.645 orang dan perempuan sebanyak 7.830 orang, sehingga rasio jenis kelaminnya sebesar 110,41 yang artinya dari 100 wanita terdapat sekitar 110 laki-laki. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2006-2008 sebesar 11,69 persen per tahun. Selanjutnya penduduk menurut kelompok umur sekolah yaitu :

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Sekolah**

| <b>Penduduk kelompok umur sekolah</b> | <b>Banyaknya</b> |
|---------------------------------------|------------------|
| SD (7-12 tahun)                       | 2.552 Orang      |
| SLTP (13-15 tahun)                    | 985 Orang        |
| SLTA (16-18 tahun)                    | 779 Orang        |

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Wasuponda (2009)



### C. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Wasuponda relative lengkap. Sarana pendidikan informal (Taman Kanak-kanak/TK) dan sarana pendidikan formal dari tingkat SD sampai SLTA telah tersedia. Pada tahun 2008 fasilitas pendidikan yaitu :

**Tabel 2**

**Jumlah Sarana Pendidikan**

| <b>Tingkat Pendidikan</b> | <b>Banyaknya</b> |
|---------------------------|------------------|
| TK                        | 4 Buah           |
| SD                        | 12 Buah          |
| SLTP                      | 3 Buah           |
| SLTA                      | 1 Buah           |

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Wasuponda (2009)

Angka Rasio Murid-Guru merupakan angka yang dapat memberikan gambaran rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas guru dalam proses belajar mengajar. Pada tahun ajaran 2008 rasio murid guru SD sebesar 21 murid setiap guru. Angka ini sedikit meningkat dibanding tahun 2006 sebesar 20 murid setiap guru. Begitu pula dengan rasio siswa guru SLTP mengalami peningkatan dari 10 siswa setiap guru, pada tahun 2006 menjadi 15 siswa setiap guru pada tahun 2008. Hal yang sama terjadi pada rasio siswa guru untuk jenjang pendidikan SLTA mengalami

kenaikan dari 10 siswa setiap guru, pada tahun 2006 menjadi sebesar 14 siswa setiap guru pada tahun 2008.

#### **D. Kesehatan**

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Wasuponda yaitu :

**Tabel 3**

**Jumlah Fasilitas Kesehatan**

| <b>Fasilitas Kesehatan</b> | <b>Banyaknya</b> |
|----------------------------|------------------|
| Puskesmas                  | 1 Buah           |
| Puskesmas Pembantu         | 5 Buah           |
| Klinik PT.INCO             | 1 Buah           |
| Polindes                   | 1 Buah           |
| Tempat Praktek Dokter      | 1 Buah           |
| Tempat Praktek Bidan       | 2 Buah           |
| Posyandu                   | 10 Buah          |
| Toko Obat                  | 2 Buah           |

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Wasuponda (2009)

Tenaga medis yang tersedia di Kecamatan Wasuponda yaitu :

**Tabel 4**

**Jumlah Tenaga medis**

| <b>Tenaga Medis</b>       | <b>Banyaknya</b> |
|---------------------------|------------------|
| Dokter                    | 1 Orang          |
| Bidan                     | 9 Orang          |
| Biddes                    | 6 Orang          |
| Dukun Bayi Terlatih       | 10 Orang         |
| Dukun Bayi belum terlatih | 5 Orang          |

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Wasuponda (2009)

Jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat di Kecamatan Wasuponda adalah infeksi saluran pernafasan bagian atas dan penyakit kulit dan jaringan bawah kulit, dengan jumlah penderita masing-masing adalah 3.342 dan 1.170 orang.

Selanjutnya jumlah wanita usia subur (WUS) di Kecamatan Wasuponda sebanyak 4.176 sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 2.681 pasangan. Dari sejumlah PUS tersebut yang terlibat sebagai akseptor KB sebanyak 1.534 pasangan, dengan rincian 485 pasangan yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan 1.049 pasangan yang menggunakan metode kontrasepsi non jangka panjang.

Selain itu, keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat masih cukup tinggi, hal ini terlihat dalam bagan dibawah ini :

**Tabel 5**

**Kemampuan ekonomi masyarakat**

| <b>sTingkat Kesejahteraan<br/>Keluarga</b> | <b>Banyaknya</b> |
|--|------------------|
| Keluarga Pra-Sejahtera                     | 624 Keluarga     |
| Sejahtera I                                | 1.301 Keluarga   |
| Sejahtera II                               | 901 Keluarga     |
| Sejahtera III+                             | 234 Keluarga     |

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Wasuponda (2009)

**E. Perumahan dan Lingkungan**

Sebagian besar bangunan rumah di Kecamatan Wasuponda masih belum permanen yaitu sebanyak 2.747 rumah, sedangkan rumah permanen sebanyak 683 rumah.

Masyarakat Kecamatan Wasuponda, sebagian menggunakan LPG dan kayu bakar untuk memasak. Sementara itu, kondisi pembuangan sampah keluarga relative baik, karena hampir seluruh desa di Kecamatan ini telah membuang sampahnya dalam lubang dan dibakar, hanya satu desa yang membuang di tempat sampah

lainnya, dan untuk tempat buang air besar pada umumnya telah menggunakan jamban sendiri.

Rumah tangga pelanggan listrik PLN di Kecamatan Wasuponda cukup besar sebanyak 1.329 rumah tangga tersebar di empat desa dan pelanggan listrik Non-PLN sebanyak 447 rumah tangga yang terdapat di 2 desa yaitu desa Kawata dan Parumpanai.

#### **F. Agama**

Sarana/tempat ibadah adalah suatu hal yang mutlak diperlukan dalam menunjang jalannya proses ibadah bagi para pemeluknya. Sarana/tempat ibadah bagi umat Islam yang terdapat di Kecamatan Wasuponda meliputi :

**Tabel 6**

#### **Jumlah Sarana Ibadah**

| <b>Tempat Ibadah</b> | <b>Banyaknya</b> |
|----------------------|------------------|
| Masjid               | 14 Buah          |
| Mushalah             | 4 Buah           |
| Gereja               | 37 Buah          |

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Wasuponda (2009)

## **G. Pertanian dan Perkebunan**

Pada tahun 2008, luas tanam padi di Kecamatan Wasuponda adalah 1.247,75 hektar yang menghasilkan produksi padi sebesar 3.962,40 ton. Selain padi Kecamatan Wasuponda merupakan produsen tanaman palawija, hortikultura dan perkebunan. Tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Kemudian tanaman hortikultura seperti ; jeruk, mangga, rambutan, duku/langsat, durian, pisang, papaya dan nangka.

Sementara itu, di sub sektor perkebunan, Kecamatan Wasuponda merupakan produsen tanaman kelapa, kopi, lada, coklat, panili dan sagu. Tanaman coklat merupakan tanaman perkebunan paling potensial dengan luas tanam sebesar 8.686,00 ha dengan produksi sebesar 2.542,500 ton selama tahun 2008.

## **H. Peternakan dan Perikanan**

Sapi merupakan ternak besar terbanyak yang terdapat di Kecamatan Wasuponda, sebanyak 1.455 ekor, sedangkan kerbau dan kuda masing-masing 346 dan 4 ekor. Sementara itu, ternak kecil yang paling banyak adalah ternak babi 501 ekor, kemudian kambing sebanyak 133 ekor. Selanjutnya ternak unggas yang terbanyak adalah ayam buras sebanyak 15.607 ekor, sedangkan ayam ras/potong dan itik masing-masing sebanyak 3.900 dan 318 ekor.

## **I. Perdagangan dan Hotel**

Untuk menunjang kegiatan perekonomian penduduk Kecamatan Wasuponda, sampai dengan tahun 2008 terdapat sebanyak 245 buah toko/warung, 28 buah rumah makan/kedai makan minum. Jumlah KUD di Kecamatan Wasuponda sebanyak 5 unit koperasi Non-KUD. Disamping itu terdapat pula 2 hotel/penginapan.

## **J. Komunikasi dan Informasi**

Fasilitas komunikasi dan informasi sangat erat hubungannya dengan kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat. Kondisi komunikasi dan informasi di Kecamatan Wasuponda relative cukup baik, hal ini tercermin dari terdapatnya fasilitas komunikasi yaitu terdapat 3 wartel. Selain itu sarana TV kabel telah tersedia sebanyak 4 perusahaan TV kabel dan fasilitas pelayanan pos tersedia dengan terdapatnya satu kantor pos pembantu.

# **PASITABE**

## **I. LATAR BELAKANG**

### **1. PERPINDAHAN PENDUDUK**

Pada Tahun 1950 mulai ada kekacauan di tanah Nuha, kemudian pada tahun 1954 keadaan makin genting sehingga masyarakat Adat Suku PADOE, KARUNSIE dan TAMBEE meninggalkan kampung halaman menyingkir secara bertahap ke Malili, kemudian ke tempat-tempat lain dan sebagian besar ke Sulawesi Tengah. Tapi dengan kehadiran PT. INCO di tanah Nuha Tahun 1969, sebagian masyarakat Adat Suku PADOE, KARUNSIE dan TAMBEE secara bertahap pulang kembali ke tanah Nuha kampung halaman.

### **2. PENDUDUK YANG TERSEBAR**

Sebagai akibat situasi dan kondisi yang dialami masyarakat Adat Suku PADOE, KARUNSIE dan TAMBEE terpaksa menyebar kemana-mana baik melalui pengurusan melalui Pemerintah maupun dengan usaha sendiri-sendiri demi untuk mencari kehidupan dan penghidupan.

### **3. SEJARAH PERTEMUAN TOKOH-TOKOH ADAT SUKU PADOE, SUKU KARUNSIE DAN SUKU TAMBEE**



Menyikapi pengalaman yang telah dialami, dan menatap perkembangan masa ke depan, maka para pendahulu kita generasi 70 tahun keatas, mereka bertemu berdiskusi, bermusyawarah membahas keberadaan masyarakat Adat Suku PADOE, KARUNSIE dan TAMBEE yang tersebar di mana-mana dan keberadaan Adat Istiadat, Budaya dan Kesenian Adat Suku PADOE, KARUNSIE dan TAMBEE yang hampir hilang.

Pertemuan I pada tahun 1962 di Pakatan Sulawesi Selatan, Pertemuan II pada Tahun 1984 di Taliwan Sulawesi Tengah, Pertemuan III dalam bentuk Musyawarah/Seminar Tahun 1992 di Wasuponda, Musyawarah/Seminar IV Tahun 1997 di Wawondula, Seminar/Musyawarah V Tahun 2004 di Wasuponda.

Berpedoman pada prinsip dasar, Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh, bagaikan beberapa batang lidi kalau terpisah dan tersendiri akan lemah dan tidak ada arti apa-apa, tetapi kalau beberapa/banyak lidi diikat menjadi satu akan kuat dan berarti serta bermanfaat. Bisa digunakan sebagai sapu, sebagai alat pembersih dan alat pemukul dan sebagainya.

Kemudian dalam Musyawarah/Seminar Tahun 1992 di Wasuponda, disepakati ikatan/gabungan suku PADOE, suku KARUNSIE, dan suku TAMBEE bernama PASITABE yang merupakan singkatan dari ketiga nama suku ini.

Dasar Lembaga Adat PASITABE berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Tujuannya yaitu :

1. Mengelola tatanan hidup Masyarakat Adat Padoe, Karunsi'e, Tambee sesuai dengan tatanan adat dan budaya yang telah disepakati turun temurun.
2. Menjaga tanah ulayat dan memelihara keberadaan Adat dan Budaya sebagai sumber nilai kearifan yang permanen.
3. Mendorong percepatan pembangunan Masyarakat Adat PASITABE yang bermarka pada peningkatan indeks Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, seni budaya, tenaga kerja, serta mendorong keberlangsungan lingkungan hidup.

## **II. SOSIALISASI**

Tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Sampai sekarang masih ada masyarakat suku PADOE, KARUNSIE & TAMBEE yang belum memahami secara mendalam fungsi, manfaat peranan dan tujuan PASITABE, sehingga menimbulkan benturan kepentingan, benturan pendirian dan sikap, akibatnya muncul perbedaan persepsi tentang keberadaan PASITABE yang pada akhirnya merugikan PASITABE yang telah dibentuk dengan tujuan yang sangat strategis dan mulia guna mengantarkan suku PADOE, suku KARUNSIE dan suku TAMBEE menggapai masa depan yang penuh damai sejahtera dan membangun

dirinya lebih baik dari yang sekarang dan yang sekarang lebih baik dari yang kemarin.

### **III. PEMAHAMAN**

Untuk memahami lebih nyata dalam keberadaan kita sebagai pribadi-pribadi dan warga masyarakat suku PADOE, KARUNSIE dan TAMBEE (PASITABE) mari kita uji dan menjawab pertanyaan sebagai berikut:

#### **1. PASITABE ITU APA (WHAT)**

PASITABE adalah singkatan dari suku PADOE, suku KARUNSIE dan suku TAMBEE yang lemah karena tersebar dan tersendiri, diikat menjadi satu agar menjadi kuat dan bermanfaat serta memiliki power yang diperhitungkan dalam kehadirannya ditengah Masyarakat, Bangsa dan Negara.

#### **2. PASITABE ITU SIAPA (WHO)**

PASITABE adalah ikatan dan kumpulan atau gabungan masyarakat adat suku PADOE, suku KARONSIE, suku TAMBEE yang nenek moyangnya pernah mendiami sebagian besar tanah Nuha dengan Pemerintahan Distrik Nuha pada tempo dulu, dan sekarang sudah berubah sesuai dengan perkembangan Pemerintahan menjadi Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Towuti.

### **3. PASITABE ITU DIMANA (WHERE)**

PASITABE itu warganya sudah tersebar dimana-mana selain yang ada di Wasuponda, Togo, Tabarano, Lioka, Wawondula, One-One, Matompi, Sorowako/Dongi, Kawata, Koropansu, Landangi, Malili, Kore-korea, Angkona, Pabeta, juga sudah menyebar baik dalam negeri maupun luar negeri. Antara lain mendiami wilayah pemukiman atau kota-kota lain di Indonesia seperti : Pakatan/Mangkutana, Palopo, Makassar, Kendari, Taliwan, Mayakeli, Tentena, Poso, Palu, Luwuk, Tiwa'a, Tomata, Taripa, Gontara, Pendolo, Ensa, Lanumor, Peonea, Taende, Londi, Beteleme, Kolonodale, Korowou, Lemboroma, Tinompo, Korompeli, Lawangke, Lee, Barati, Toinasa, Tonusu, Meko, Tambarana, Manado, Jakarta, dan Amerika.

### **4. PASITABE ITU KAPAN (WHEN)**

PASITABE di cetuskan dan dibentuk oleh generasi pendahulu kita pada Musyawarah/Seminar Adat Budaya III pada tahun 1992 di Wasuponda Sulawesi Selatan.

Jadi kita telah bergabung dengan nama PASITABE selama 18 Tahun.

## **5. PASITABE ITU MENGAPA (WHY)**

PASITABE itu dibentuk dengan maksud membina kerukunan kebersamaan, kesatuan, persatuan, koordinasi, komunikasi, serta mempererat tali persaudaraan dan sekaligus sebagai ikatan lahir dan batin masyarakat adat suku PADOE, KARUNSIE & TAMBEE yang tercerai-berai, dan tersebar.

Selain itu agar tetap melestarikan adat istiadat, budaya, kesenian dan bahasa, menjaga lahan/tanah keluarga dan tanah warisan yang turun-temurun serta tanah kampung halaman,

Dengan Semboyan :

**BIARPUN KITA BERPISAH- PISAH, TETAPI TETAP BERSATU,  
INGAT TANAH TUMPAH DARAH. BERSATU KITA TEGUH,  
BERCERAI KITA RUNTUH.**

## **6. PASITABE ITU BAGAIMANA (WHERE)**

PASITABE itu merupakan ikatan dan sekaligus sebagai alat pemersatu. Sebagai wadah untuk saling mendukung, saling menolong , saling peduli, dan temu bicara, menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Dijinjing .Oleh karna itu PASITABE perlu terus dipertahankan dan dihayati kehadirannya di tengah kegiatan kemasyarakatan

dan adat istiadat, budaya dan kesenian masyarakat suku PADOE, suku KARUNSIE dan TAMBEE.

#### **4. SARANA, PRASARANA DAN PIRANTI ADAT, BUDAYA, KESENIAN SERTA PERALATAN PENDUKUNG**

1. Tipe dan model rumah adat suku Padoe, Karunsi'e, dan Tambee
2. Tempat rumah adat untuk tahap pertama, Wasuponda, Wawondula, Pakatan, Landangi/Koropansu, Mayakeli, Taliwan, Tiwaa, Lanumor
3. Pakaian Adat Mohola, warna Merah Maron dengan aksesoris  
Pakaian Adat Dewan Adat, warna Hitam dan aksesoris (contoh : baju tahun 2004)
4. Pakaian Adat Pengantin, warna Putih / Merah / Kuning, dan aksesoris  
Pakaian Adat Umum, warna Hitam tanpa aksesoris
5. Pakaian Tarian / Kesenian, bervariasi tanpa menghilangkan ciri khas.  
Dilombakan pada festival dan lomba peragaan busana adat
6. Topi, dengan tiga macam model yang bisa dipilih sesuai dengan jenis kegiatan yang diikuti (pasapu; sedang; tipis dengan aksesoris)
7. Sanggar budaya didirikan bersama dengan rumah adat
8. Kantor Lembaga Adat PASITABE Pusat didirikan di Wasuponda

## ❖ **BADAN PENGURUS**

Lembaga Adat PASITABE terdiri dari: Dewan Mohola, Dewan Adat Pusat dan Badan Pengembangan Pusat PASITABE. Dewan Mohola merupakan pimpinan tertinggi Hukum Adat PASITABE. Dewan Adat Pusat merupakan pelaksana operasional Hukum Adat PASITABE yang berlaku secara turun temurun. Dewan Adat Pusat PASITABE tidak dipilih melainkan ditunjuk dan ditetapkan oleh Dewan Mohola. Badan Pengembangan Pusat atau yang kemudian disingkat BPP PASITABE merupakan pelaksana operasional pengembangan Masyarakat Adat PASITABE yang mengacu kepada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). BPP PASITABE dipilih didalam Musyawarah Adat PASITABE.

### • **Dewan Mohola**

1. Dewan Mohola adalah penanggungjawab tertinggi atas pelaksanaan Hukum Adat PASITABE dimana Masyarakat Adat PASITABE berdomisili.
2. Dewan Mohola terdiri atas 3 (Tiga) orang yang masing-masing Mohola Suku Padoe, Karunsi'e, Tambee. Pengambilan Keputusan Dewan Mohola menganut asas kepemimpinan bersama.
3. Dewan Mohola tidak dipilih melainkan mengacu kepada hirarki jabatan melalui keturunan dari masa lampau.
4. Dewan Mohola memiliki kewenangan:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Dewan Adat PASITABE.
  - b. Memberikan Nasihat kepada Dewan Adat dan Badan Pengembangan Pusat PASITABE baik diminta atau tidak.
  - c. Mengangkat dan mengukuhkan Dewan Adat Pusat PASITABE.
  - d. Bersama dengan Dewan Adat Pusat mewakili Lembaga Adat PASITABE dalam kegiatan Adat dan Budaya ditingkat lokal, Nasional dan Internasional
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Mohola mengacu pada Keputusan Musyawarah Adat, Wunta Atora dan keputusan-keputusan lainnya.
6. Masa bakti Dewan Mohola akan berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Melanggar peraturan hukum adat
7. Apabila salah satu sebab seperti yang maksudkan pada poin 6, masa bakti Dewan Mohola berakhir, proses suksesi akan diputuskan oleh Dewan Adat Pusat PASITABE.



- **Dewan Adat**

1. Dewan Adat PASITABE terdiri atas Dewan Adat Pusat dan Dewan Adat Wilayah.
2. Dewan Adat Pusat adalah penanggungjawab operasional implementasi hukum Adat PASITABE didalam Masyarakat Adat PASITABE.
3. Dewan Adat Pusat berkedudukan di Wasuponda terdiri atas 9 orang yang masing-masing diwakili 3 orang dari setiap Suku (Padoe, Karunsi'e, Tambee).
4. Dewan Adat Pusat diangkat dan dikukuhkan oleh Dewan Mohola.
5. Dewan Adat Pusat berwenang atas:
  - a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Hukum Adat ditingkat wilayah,
  - b. Mewakili Lembaga Adat PASITABE pada kegiatan Adat dan Budaya ditingkat lokal, nasional dan Internasional,
  - c. Menyelesaikan sengketa yang menyangkut Adat Istiadat dan kebiasaan Masyarakat Adat PASITABE yang diajukan oleh Dewan Adat Wilayah PASITABE.
  - d. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemerintah, swasta dan Masyarakat Adat .

- e. Dewan Adat pusat Mengangkat dan mengukuhkan Dewan Adat Wilayah.
- 6. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Adat mengacu pada Keputusan Musyawarah Adat, Wunta Atora dan keputusan-keputusan lainnya.
- 7. Masa bakti Dewan Adat Pusat akan berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Melanggar peraturan hukum adat

- **Dewan Adat Wilayah**

- 1. Dewan Adat Wilayah PASITABE adalah Badan Pelaksana di tingkat wilayah dalam hal pelaksanaan Hukum Adat PASITABE.
- 2. Dewan Adat Wilayah PASITABE mempunyai kewenangan:
  - a. Melaksanakan kebijakan pelaksanaan Adat PASITABE di tingkat wilayah.
  - b. Memberikan pertanggungjawaban pada dewan Adat Pusat.
  - c. Bersama dengan Dewan adat pusat mengikuti kegiatan adat dan budaya ditingkat lokal,nasional, dan internasional
- 3. Masa bakti Dewan Adat Wilayah berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Melanggar hukum adat

- **Badan Pengembangan Pusat (BPP)**

1. Badan Pengembangan Pusat (BPP) PASITABE adalah Badan Pelaksana operasional pengembangan Masyarakat Adat PASITABE
2. Badan Pengembangan Pusat (BPP) PASITABE mempunyai kewenangan:
  - a. Melaksanakan program hasil-hasil keputusan Musyawarah adat PASITABE.
  - b. Mengesahkan komposisi dan personalia Badan Pengurus Wilayah/Perwakilan (BPW/P) PASITABE.
  - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kebijakan organisasi di tingkat wilayah/perwakilan.
3. BPP memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh Keputusan Musyawarah, kebijakan Pengembangan Masyarakat Adat PASITABE dalam Musyawarah Adat PASITABE.
4. Periode kepengurusan BPP dan BP Wilayah/perwakilan PASITABE selama 5 tahun.

- **Badan Pengembangan Wilayah (BPW)**

1. BPW PASITABE adalah Badan Pelaksana di tingkat wilayah/perwakilan dalam hal pelaksanaan kebijakan organisasi Lembaga Adat PASITABE.
2. BPW PASITABE dipilih melalui Musyawarah ditingkat Wilayah dan dikukuhkan oleh BPP PASITABE
3. BPW PASITABE mempunyai kewenangan:
  - a. Melaksanakan keputusan musyawarah adat pusat dan kebijakan-kebijakan organisasi PASITABE di tingkat wilayah/perwakilan.
  - b. Membentuk dan menetapkan komposisi serta personalia organisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat PASITABE di wilayah/perwakilan setempat.
  - c. Memberikan pertanggungjawaban dalam musyawarah wilayah/perwakilan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Modal sosial PASITABE sebagai lembaga adat dalam proses kesejahteraan masyarakat dengan indikator yaitu rasa kepercayaan, keadilan, tanggung jawab, gotong royong dan lainnya dalam memudahkan kerjasama sejauh ini sudah terlaksana dan terjalin dengan baik. Kerjasama akan terjalin dengan baik apabila dilandasi oleh kepercayaan di antara warga. Kepercayaan inilah yang membentuk ikatan modal sosial menjadi kuat. Permasalahan yang terjadi saat ini, memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak-hak dari masyarakat PASITABE, mengingat kita berada dalam kontrak kerja PT. Vale. Wujud kesejahteraan yang diberikan PASITABE dalam hal ini rasa aman, pemenuhan kebutuhan hidup, terlaksananya aktifitas dalam masyarakat, menikmati setiap proses sosial yang dilaksanakan oleh lembaga adat PASITABE.
2. Faktor-faktor yang mendukung terlaksananya proses sosial dalam masyarakat PASITABE yaitu dalam hal bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja yang secara bersama meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan

berbagai program dan kegiatan yang memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Lembaga adat PASITABE tetap dipertahankan ditengah kemajuan dan arus globalisasi yang berkembang serta terus berbenah diri demi kehajatan hidup masyarakat PASITABE. Dan kiranya keberadaan lembaga adat ini dapat diakui keberadaannya di seluruh lapisan masyarakat.
2. Perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya, kiranya dapat diteruskan kegenerasi-generasi berikutnya untuk dapat mempertahankan lembaga adat PASITABE.